
STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA TASIKMALAYA

Iwan Satibi¹ & Undang Sudrajat²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

Email: iwan.satibi@unpas.ac.id

Abstract

This study aims to determine the strategy of poverty reduction policies in the City of Tasikmalaya by using a benchmarking model. This study uses the mix methods, which combine qualitative and quantitative approaches. The results of the study found that the implementation of poverty reduction policies in the City of Tasikmalaya, had not yet been fully effective. Therefore, a strategy is needed to streamline the implementation of poverty reduction policies that refer to the results of benchmarking. The results cover two main things, namely the need for the political will of the regional head and the establishment of a special institution that handles poverty.

Keywords: *policy implementation, political will, poverty reduction.*

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan terjadinya ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Ritonga (2003) kemiskinan juga merupakan suatu kondisi kehidupan serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga, sehingga ia tidak mampu memenuhi kebutuhan minimal atau yang layak bagi kehidupannya.

Kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Todaro dan Smith, 2006). Sementara kemiskinan relatif, menurut Biro Pusat Statistik (BPS) sebagai kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Dilihat dari penyebabnya, menurut Sumodiningrat (1998), kemiskinan terdiri dari tiga hal yaitu kemiskinan natural, kultural dan struktural.

Kemiskinan natural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh faktor alamiah, karena cacat, sakit, usia lanjut atau bencana alam. Sedangkan kemiskinan kultural diartikan kondisi kemiskinan yang terjadi karena faktor budaya atau kultur di masyarakat itu sendiri. Penyebab kemiskinan ini karena sikap seseorang atau masyarakat, seperti boros, malas, atau pasrah dengan keadaan yang dihadapinya. Orang-orang miskin ini adalah kelompok yang mempunyai budaya kemiskinan sendiri yang mencakup karakteristik psikologis sosial, dan ekonomi (Lewis, 1983:56).

Banyak faktor kebijakan yang perlu diperhatikan dalam menanggulangi kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain; konsep, pendekatan, strategi, rumusan, teknik, taktik, dan pelaksana serta keberfihakan pemerintah terhadap masyarakat. Idealnya, berbagai faktor tersebut harus tercakup dalam satu dokumen lengkap, sehingga mampu mengatasi problem kemiskinan secara tepat dan komprehensif. Jika salah satu faktor terbaikan, maka peluang terjadinya peningkatan kemiskinan akan terbuka lebar, yang kemudian dapat berimplikasi pada penurunan kesejahteraan pada masyarakat. Oleh sebab itu, berbagai faktor pendukung kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan harus tepat dan efektif.

Secara kelembagaan upaya untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan masih terus dilakukan oleh pemerintah, namun angka kemiskinan hingga saat ini relative masih tinggi. Salah satu daerah di Jawa Barat dengan angka kemiskinan yang masih tinggi adalah Kota Tasikmalaya. Kemiskinan di Kota Tasikmalaya, masih di atas rata-rata angka kemiskinan di Jawa Barat dan nasional. Pada tahun 2014 angka kemiskinan di Jawa Barat sebesar 9,18%, nasional 10,9%, sedangkan Kota Tasikmalaya sebesar 15,95%. Kemudian pada tahun 2015, angka kemiskinan di Jawa Barat mencapai 9,57%, nasional 11,13%, sedangkan Kota Tasikmalaya sebesar 16,28%. Sedangkan tahun 2016, angka kemiskinan di Jawa Barat turun menjadi 8,95% dibandingkan tahun sebelumnya, untuk nasional 10,7%, sedangkan Kota Tasikmalaya sebesar 15,6%.

Mencermati berbagai fakta empiris di atas, dapat diketahui bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya relatif masih tinggi, yaitu di atas rata-rata Jawa Barat dan rata-rata angka kemiskinan secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di Kota Tasikmalaya masih menjadi masalah serius yang membutuhkan penanggulangan secara cepat dan tepat. Berpijak dari uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dan strategi untuk mengatasi penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

B. LITERATURE RIVIEW

Pentingnya memahami pendekatan dalam implementasi kebijakan, telah disinggung oleh Laswell yang mengisyaratkan bahwa untuk memahami kebijakan publik dapat digunakan suatu pendekatan yang disebut sebagai *policy process approach* (pendekatan proses dalam kebijakan). Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa implementasi merupakan salah satu bagian dari beberapa tahapan yang harus dilalui dari keseluruhan proses perumusan kebijakan, selain pembuatan agenda kebijakan, legitimasi dan evaluasi kebijakan (Varma, 1996).

Smith mengajukan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan istilah "*A Model of The Policy Implementation Process.*" Model ini dipandang sebagai model implementasi kebijakan yang paling klasik, yang di dalamnya terkait empat variabel. keempat variabel tersebut antara lain; (1) kebijakan yang diidealkan (*idealised policy*), yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan, (2) kelompok sasaran (*target group*), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan, (3) *Implementing organization*, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan, (4) *environmental factor*, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang memengaruhi

atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik (Tachjan, 2006).

Sedangkan Van Metter dan Van Horn (Winarno, 2002) mengajukan model implementasi kebijakan yang dikenal dengan sebutan *A Model of the Policy Implementation*. Kedua pakar tersebut mengemukakan enam variabel yang dianggap memengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, serta lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

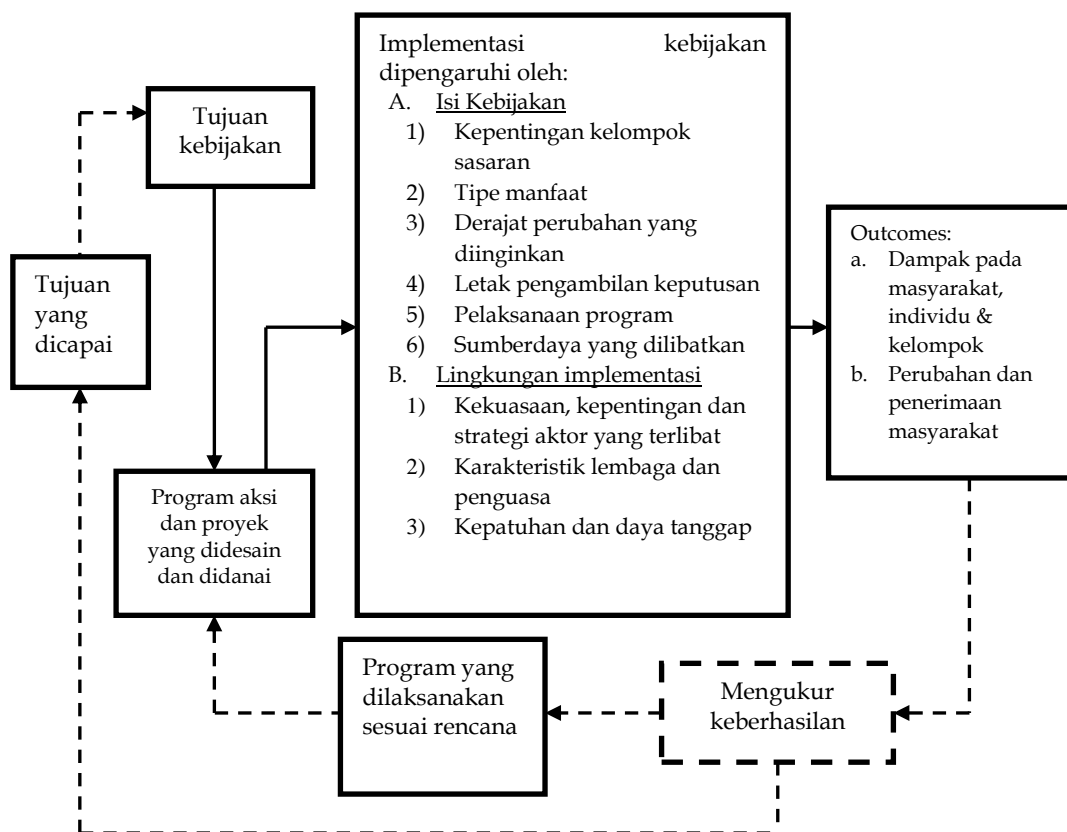
Model implementasi kebijakan yang menekankan pada tercapainya proses implementasi dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (Nugroho, 2004) yang mengemukakan model *A Framework for Policy Implementation Analysis*. Ada 3 (tiga) variabel penting yang memengaruhi tercapainya proses implementasi kebijakan, antara lain: mudah-tidaknya masalah yang akan digarap dikendalikan, kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi, dan variabel di luar undang-undang yang memengaruhi proses implementasi.

Menurut Edwards III (1980), ada empat faktor (*four critical factor*) yang sangat menentukan efektivitas implementasi suatu kebijakan publik antara lain: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi dan (4) struktur birokrasi.

Sementara menurut Grindle (1980) variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu pertama, *content of policy* yang meliputi *interest affected* (kepentingan yang memengaruhi), *type of benefits* (tipe manfaat), *extent of change envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai), *site of decision making* (letak pengambilan keputusan), *program implementer* (pelaksana program) dan *resources committed* (sumber daya yang digunakan). Kedua, *context of policy*, yang meliputi *power, interest and strategy of actor involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat), *institution and regime characteristic* (karakteristik lembaga dan rejim yang berkuasa), dan

compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respons dari pelaksana).

Terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan, menurut Grindle (1980) diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*). Implementasi kebijakan berhasil jika tujuan yang diharapkan dapat dinyatakan tercapai atau tidaknya. Untuk memetakan secara komprehensif tentang konstruksi implementasi kebijakan menurut Grindle (1980), dapat dicernati dari gambar model implementasi kebijakan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1 Implementasi Proses Politik dan administartif
Sumber: Grindle (1980)

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mix Method* (penelitian campuran). Secara substantif, jenis metode ini pada tahap pertama menggunakan pendekatan kualitatif dan pada tahap kedua menggunakan

pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, yang meliputi; observasi, wawancara dan questioner. Kemudian analisis kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan analisis data, yakni: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi. Sedangkan analisis data kuantitatif dilakukan dengan menggunakan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

Menurut Grindle keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi dua hal yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*Context of Implementation*). Isi kebijakan secara substantive mencakup; pertama, *interest affected* atau kepentingan yang dipengaruhi. Kedua, *type of benefits* atau tipe manfaat. Ketiga, *extent of change envision* atau derajat perubahan yang ingin dicapai. Keempat, *site of decision making* atau letak pengambilan keputusan. Kelima, *resources committed* atau sumber-sumber daya yang digunakan. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Hasil penelitian menemukan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya dalam konteks penanggulangan kemiskinan, antara lain; *pertama*, berupa program bantuan sosial berbasis individu, keluarga atau rumah tangga. Sebagian besar program ini bantuan dari pemerintah pusat. *Kedua*, penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Bentuk program bantuan sosial, seperti bantuan pangan non tunai (BNPT). Bantuan lain disalurkan berupa jaminan kesehatan nasional, dan jaminan kesehatan dari sumber dana anggaran pembangunan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Tasikmalaya. Bantuan ini punya kepentingan yaitu untuk menjaga kesehatan masyarakat, terutama warga

miskin. Jika kesehatan masyarakat bisa terjaga, mereka bisa produktif atau bekerja untuk memberikan penghasilan atau perbaikan kesejahteraan.

Bantuan sosial jaminan kesehatan lewat BPJS untuk Kota Tasikmalaya mencapai 256.223 kepersertaan, sedangkan untuk program dari APBD Jabar dan APBD Kota Tasikmalaya sebanyak 57.493 kepersertaan, dengan bantuan iuran setiap bulannya Rp 23.000/setiap orang. Sedangkan program kesehatan bagi warga miskin ini, ada alokasi tambahan. Alokasi untuk jaminan kesehatan daerah tambahan sebesar Rp. 10 miliar di tahun 2017 dan Rp. 8 miliar tahun sebelumnya, diperuntukan bantuan pelayanan kesehatan warga miskin yang tidak terlayani lewat BPJS dari pusat atau daerah. Caranya, yaitu mereka menyertakan surat keterangan tak mampu dari kelurahan.

Program lain diperuntukan warga miskin yaitu Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH. Program ini berupa pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, Kota Tasikmalaya baru menerima pada tahun 2013. Program PKH digulirkan oleh pemerintah pusat mulai tahun 2007.

Nilai bantuan merujuk Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Indeks dan Komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Tahun 2017. Komponen bantuan dan indeks bantuan PKH pada tahun 2017, sebagai berikut:

- a. Bantuan Sosial PKH Rp. 1.890.000
- b. Bantuan Lanjut Usia Rp. 2.000.000
- c. Bantuan Penyandang Disabilitas Rp. 2.000.000
- d. Bantuan Wilayah Papua dan Papua Barat Rp. 2.000.000

Penerima PKH warga Kota Tasikmalaya, pada tahun 2015 sebanyak 20.321 keluarga, pada tahun 2016 sebanyak 20.161 keluarga, dan tahun 2017 mengalami penambahan menjadi 27.184 keluarga. Nilai uang disalurkan, pada tahun 2015 untuk PKH Kota Tasikmalaya, sebesar Rp. 33.574.890.000,

tahun 2016 nilainya mencapai Rp. 40.206.636.250, di tahun 2017 bantuan disalurkan sebesar Rp. 51.753.190.000,00.

Program bidang pendidikan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini merupakan kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang ingin menyekolahkan anaknya yang berusia 7-12 tahun secara gratis. Mereka yang mendapat KIP ini akan diberikan dana tunai dari pemerintah secara reguler yang tersimpan dalam fungsi kartu KIP untuk bersekolah secara gratis tanpa biaya.

Selain dalam bentuk bantuan, percepatan penanggulangan kemiskinan, juga dilakukan dengan pemberdayaan. Begitu juga yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya, bahwa kepentingan proram ini untuk kemandirian warga miskin. Arah penanggulangan kemiskinan tidak hanya bantuan, tetapi juga pada pemberdayaan dan pengembangan kapasitas serta potensi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat terlepas dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Ada beberapa program yang disusun dalam pengentasan kemiskinan lewat program pemberdayaan. Program ini tersebar di sejumlah dinas atau bagian di lingkungan Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Adapun rekapitulasi program penanggulangan kemiskinan pada tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Penanggulangan Kemiskinan Per-Triwulan III Tahun 2016

No	Kelompok Program	APBN	APBD I	APBD II	Jumlah
1	Bantuan Sosial Berbasis Keluarga	282.508.063.750	19.648.957.600	14.255.761.600	316.412.782.950
2	Pemberdayaan Masyarakat	26.070.000.000	-	16.148.147.500	42.218.147.500
3	Pemberdayaan Usaha Mikro	1.624.100.000	-	3.363.622.500	4.987.722.500
4	Pro Rakyat Lainnya	6.923.840.000	3.540.000.000	2.978.819.000	13.442.659.000
Jumlah		317.126.003.750	23.188.957.600	36.746.350.600	377.061.311.950

Sumber: Bappeda Kota Tasikmalaya, Tahun 2016

Kemudian rekapitulasi program penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2 Penanggulangan Kemiskinan Per- Triwulan III Tahun 2017

No	Kelompok Program	APBN	APBD I	APBD II	Jumlah
1	Bantuan Sosial Berbasis Keluarga	237.8210.51259	6.345.114.000	23.265.205.207	266.516.667.469
2	Pemberdayaan Masyarakat	9.508.400.000	-	12.992.851.027	22.501.251.027
3	Pemberdayaan Usaha Mikro	-	-	8.140.234.103	8.140.234.103
4	Pro Rakyat Lainnya	-	-	4.780.964.460	4.780.964.460
Jumlah		247.367.610.512	6.345.114.000	49.179.254.797	301.939.117.059

Sumber: Bappeda Kota Tasikmalaya, Tahun 2017

Hasil penelitian menemukan bahwa dalam perspektif manfaat kebijakan, terlihat adanya upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di bawah tugas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya, dalam konteks kebijakan distributif yaitu berupa bantuan keuangan untuk warga miskin, seperti program bantuan pangan tunai, pemberian jaminan kesehatan, kartu Indonesia pintar untuk bidang pendidikan, program keluarga harapan (PKH). PKH berupa program perlindungan sosial yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin dengan syarat memenuhi kewajiban terkait pendidikan dan kesehatan.

Manfaat program PKH antara lain untuk meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial; Manfaat lain, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan; menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial; mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.

Begitu juga dengan bantuan pangan non tunai yang merupakan program pengganti bantuan beras miskin. Warga penerima bantuan menyampaikan manfaat bantuan itu sangat besar. Hasil penelitian menggambarkan bahwa peralihan lahan pertanian menjadi bangunan pertokoan atau perumahan telah menyebabkan sebagian besar warga yang berusaha di bidang pertanian, telah kehilangan pekerjaan. Mereka tak bisa lagi menanam padi atau ikut panen. Padahal saat ikut panen, sering mendapat bagi hasil dari hasil panen tersebut.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa bantuan perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam strategi kebijakan untuk menurunkan kemiskinan serta memperkecil kesenjangan. Dalam arti luas, seperti pemberian jaminan kesehatan lalu untuk kartu Indonesia pintar atau bantuan dalam bidang pendidikan untuk kelangsungan anak-anak sekolah dari keluarga miskin, manfaatnya untuk melindungi atau meringankan dampak kemiskinan yang dihadapi warga miskin dan anak-anaknya.

Sementara itu, program pemberdayaan diluncurkan untuk penanggulangan keluarga miskin, berupa pelatihan usaha, pemberian modal, pengembangan usaha peternakan, pertanian, kerajinan, warung atau pelatihan keterampilan dengan tujuan warga miskin bisa beranjak dengan memiliki kemampuan dirinya berusaha. Pertimbangannya, dengan adanya bantuan modal, keterampilan atau keahlian, maka mereka akan memiliki pekerjaan baik usaha sendiri atau bekerja di tempat pihak lain. Melalui kesempatan bekerja tersebut, warga tak mampu memiliki pendapatan rutin yang tentunya bisa meningkatkan kesejahteraan mereka.

Extent of change envision pada intinya menjelaskan sejauh mana derajat perubahan yang diinginkan oleh kebijakan atau target yang telah ditentukan. Biasanya, setiap kebijakan yang dikeluarkan akan menentukan target yang akan dicapai atau dituju, termasuk dalam penanggulangan kemiskinan ditentukan target hendak dicapai. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Pemerintah Kota Tasikmalaya, telah menyusun target penurunan kemiskinan

dalam setiap tahunnya. Dengan adanya target yang telah ditetapkan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya, memiliki tantangan untuk mencapai target tersebut.

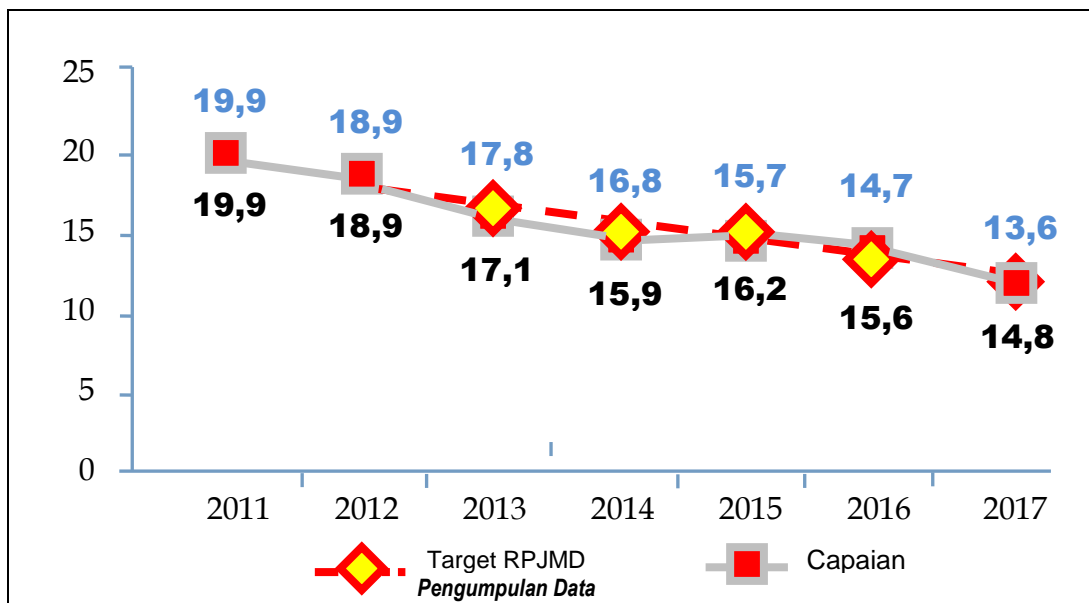
Untuk memetakan angka kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan perkembangan dari tahun 2013 sampai 2017, dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 3 Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
Garis Kemiskinan (Rp/Bulan/Kapita)	337,841	351,718	367,673	397,215	416.000
Penduduk Miskin (Orang)	112,163	105,440	106,780	102,79	97.850

Sumber: Bappeda Kota Tasikmalaya 2018

Sedangkan Realisasi dan Target Laju Penurunan Kemiskinan Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 2 Realisasi dan Target Laju Penurunan Kemiskinan Kota Tasikmalaya

Sumber: Bappeda Kota Tasikmalaya, Tahun 2018

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap perhitungan alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Pengambilan keputusan merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan suatu

kebijakan. Bahkan, pengambilan keputusan sering dikatakan sebagai kunci dalam kebijakan karena semua pihak terlibat dalam menentukan kesimpulan untuk dilaksanakan.

Hasil penelitian menemukan bahwa penentuan program pemberdayaan masyarakat ini memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dinilai sangat penting dan strategis dalam penanggulangan kemiskinan, karena pemberdayaan masyarakat lebih kearah upaya berencana yang dirancang untuk merubah atau melakukan pembaharuan pada suatu komunitas atau masyarakat dari kondisi ketidakberdayaan menjadi berdaya dengan menitikberatkan pada pembinaan potensi dan kemandirian masyarakat.

Pada sisi lain, ditemukan fakta bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, secara operasional memiliki tugas untuk mengkoordinasikan program-program yang akan dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Sayangnya dalam penentuan orang-orang atau siapa yang akan diberi bantuan usaha, atau kelompok yang diberi bantuan usaha pertanian, perikanan atau peternakan, dikembalkikan ke dinas masing-maisng. Hal inilah yang menimbulkan terjadinya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya. Tanpa dukungan sumberdaya, kebijakan hanya akan menjadi dokumen yang tidak diwujudkan untukmemberikan pemecahan masalah yang ada di masyarakat, atau upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

Masalah sumber daya menjadi salah satu kelemahan dimiliki oleh tim, maupun di satuan kerja perangkat daerah. Beberapa dinas terkait penaggulangan kemiskinan, hanya memiliki staf 17 pegawai, sudah termasuk tenaga honorer. Selain masalah kekurangan tenaga ahli atau staf, tim juga tidak

memiliki biaya operasioal. Karena tak ada anggaran, maka tim kesulitan untuk monitoring atau kegiatan-kegiatan lain, dalam proses penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya. Seharunya, anggaran daerah untuk tim juga ada, sehingga kegiatan kesekretariatan berjalan dengan maksimal.

Sedangkan lingkungan implementasi (*context of implementation*) secara substantive mencakup; **pertama**, *power, interest, and strategy of actor involved*. Atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat. **Kedua**, *institution and regime characteristic* atau karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa. **Ketiga**, *compliance and responsiveness* atau tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana.

Kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya, merupakan amanat dari pemerintah pusat lewat Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010. Tim ini merupakan lintas sektoral dan lintas pemangku pemangku kepentingan di tingkat pemerintah kabupaten atau kota. Tim dibentuk dengan Surat Keputusan Wali Kota Tasikmalaya, Nomor: 400/ Kep. 133-Bappeda/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggungan Kemiskinan Kota Tasikmalaya. Tim selain mengkoordinasikan program penanggulangan kemiskinan juga diberi tugas untuk monitoring dan evaluasi program terkait penanggulangan kemiskinan. Selama menjalankan tugasnya, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Tasikmalaya, juga dihauskan koordinasi dengan tim yang ada di tingkat provinsi dan tim nasional.

Di tingkat provinsi ada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Barat, sedangkan nasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Nasional yang dipimpin Wakil Presiden. Dengan turunnya keputusan pembentukan tim dari pusat, seharusnya ada koordinasi dari tim di daerah dengan nasional, ini menunjukkan bahwa masalah penanggulangan kemiskinan menjadi urusan bersama mulai dari nasional sampai ke daerah. Kepentingan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan juga adalah kepentingan bersama dari pusat dan daerah.

Secara umum untuk program bantuan dan jaminan sosial merupakan kebijakan dari pusat. Tim hanya memantau, memfasilitasi dan monitoring kegiatan penyaluran bantuan. Apalagi bantuan itu, langsung dikirim ke rekening sasaran. Bantuan sosial yang kerap disebut bantuan public dan pelayanan ke sejahteraan mencakup bantuan uang, barang atau layananan sosial untuk membantu atau melindungi individu atau keluarga yang paling rentan, agar mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Sementara dari Kota Tasikmalaya, yang langsung direncanakan dan disiapkan program untuk penanggulangan kemiskinan, banyak untuk pemberdayaan. Namun, komitmen daerah untuk penanggulangan kemiskinan belum begitu besar. Padahal angka kemiskinan Kota Tasikmalaya cukup tinggi.

2. Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya

Pembahasan tentang strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, sesungguhnya merupakan salah satu upaya untuk mengatasi persoalan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang hingga saat ini masih dinilai belum berjalan dengan efektif. Strategi penanggulangan kemiskinan ini didesain berdasarkan perspektif teoritik sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1980), yang kemudian dipadukan dengan basis empiris (*novelty*) sebagai penguatan logika akademik dalam penelitian ini

Hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), dalam konteks implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4 Hasil Perhitungan *Analitycal Hierarchy Process* (AHP)

Level 1	Level 2
<i>Political Will dan Kelembagaan</i> = .417	1. Kemauan politik kepala daerah = .143
	2. Adanya kelembagaan tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan = .113
	3. Struktur organisasi yang efektif = .092
	4. Sinergitas diantara semua pemangku kepentingan = .069

Isi Kebijakan = .314	1. Kepentingan kelompok sasaran atau target groups dalam memahami isi kebijakan penanggulangan kemiskinan. = .073
	2. Jenis manfaat apa yang diterima oleh target group atau sasaran dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. = .051
	3. Perubahan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan. = .045
	4. Ketepatan program penanggulangan kemiskinan = .034
	5. Kebijakan penanggulangan kemiskinan telah menyebutkan implementatornya secara rinci. = .031
	6. Program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya manusia yang memadai = .025
	7. Program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai = .021
	8. Program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya fasilitas yang memadai. = .018
	9. Program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya teknologi yang memadai = .016
Lingkungan Kebijakan = .269	1. Besarnya kekuatan para sektor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan = .081
	2. Besarnya kepentingan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan = .062
	3. Besarnya strategi para aktor yang terlibat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan = .051
	4. Tingkat kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan = .042
	5. Tingginya responsivitas kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan = .033

Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018)

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwa skala prioritas yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menetapkan strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan

dapat didesain menurut urutan langkah sebagai berikut pertama dimensi *political will* dan kelembagaan dengan nilai prioritas sebesar 0,417. Prioritas kedua, yakni dimensi isi kebijakan dengan nilai prioritas sebesar 0,314. Sedangkan dimensi yang terakhir yang harus dilakukan dan mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya adalah Dimensi Lingkungan Kebijakan dengan nilai prioritas sebesar 0,269

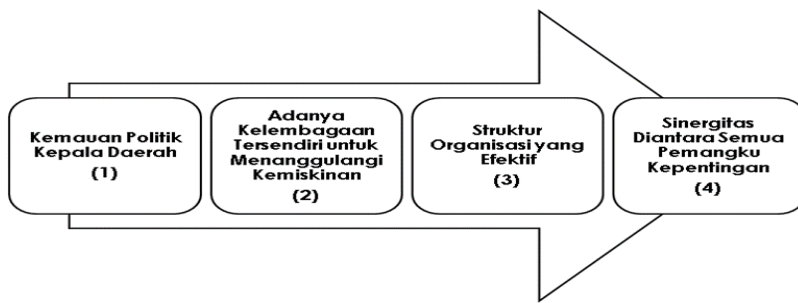
Berdasarkan hasil *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), maka pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, berdasarkan dimensi implementasi kebijakan, secara komprehensif dapat dilukiskan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 3 Pola Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Dimensi Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan *action plan* dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dalam konteks tersebut, langkah-langkah strategi yang harus dilaksanakan dalam menterjemahkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, sudah selayaknya memprioritaskan langkah-langkah sebagai berikut; *pertama* dimensi *political will* dan kelembagaan, *kedua* dimensi isi kebijakan dan *ketiga* dimensi lingkungan kebijakan.

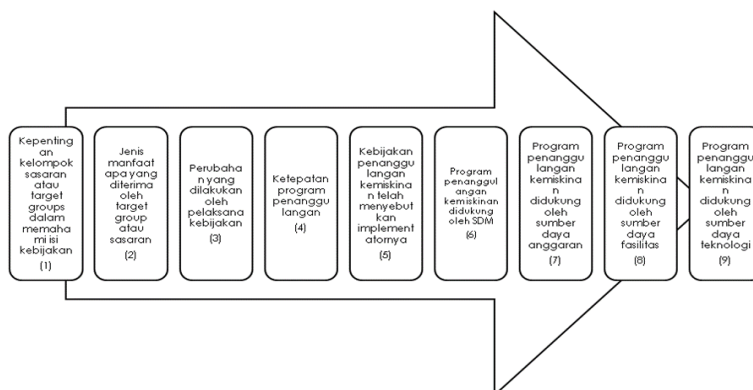
Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), diperoleh pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan indikator dari dimensi *political will* dan kelembagaan terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 4 Pola Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Dimensi *Political Will* dan Kelembagaan

Berdasarkan gambar di atas, maka untuk mengefektifkan implementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan berdasarkan indikator *political will* dan kelembagaan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan langkah-langkah yang bersifat strategis dengan mengacu kepada pola strategi implementasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut: pertama kemauan politik kepala daerah, kedua, adanya kelembagaan tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan, ketiga, struktur organisasi yang efektif dan keempat, sinergitas diantara semua pemangku kepentingan.

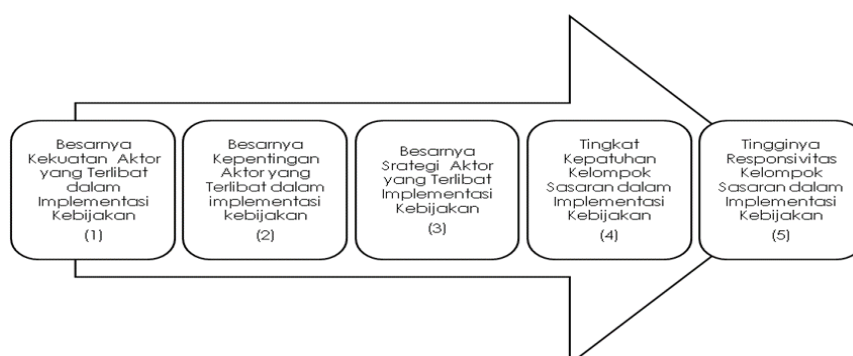
Berdasarkan hasil perhitungan *Analitycal Hierarki Proses* (AHP), diperoleh pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan indikator dari dimensi isi kebijakan sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 5 Pola Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Dimensi Isi Kebijakan

Berdasarkan gambar di atas, untuk mengefektifkan strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya berdasarkan indikator *Dimensi isi kebijakan*, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan langkah atau upaya dengan mengacu kepada pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut: *pertama*, kepentingan kelompok sasaran atau target groups dalam memahami isi kebijakan penanggulangan kemiskinan. *Kedua*, jenis manfaat apa yang diterima oleh target group atau sasaran dari implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. *Ketiga*, perubahan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan penanggulangan kemiskinan. *Keempat*, ketepatan program penanggulangan kemiskinan. *Kelima*, kebijakan penanggulangan kemiskinan telah menyebutkan implementasinya secara rinci. *Keenam* program penanggulangan kemiskinan didukung oleh SDM sumber daya manusia yang memadai. *Ketujuh*, program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai. *Kedelapan*, program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya fasilitas yang memadai. *Kesembilan*, program penanggulangan kemiskinan didukung oleh sumber daya teknologi yang memadai.

Pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya yang didasarkan basis indikator dari dimensi lingkungan kebijakan. Konstruksi pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 6 Pola Strategi Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Indikator Dimensi Lingkungan Kebijakan

Berdasarkan gambar di atas, untuk mengefektifkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya dilihat dalam perspektif indikator dimensi lingkungan kebijakan, Pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan upaya yang serius dan komprehensif dengan berpedoman pada pola strategi implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut: pertama, besarnya kekuatan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Kedua, besarnya kepentingan para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Ketiga, besarnya strategi para aktor yang terlibat implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Keempat, tingkat kepatuhan kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, dan kelima, tingginya responsivitas kelompok sasaran dalam implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan.

E. KESIMPULAN

Hasil penelitian menemukan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya, belum berjalan dengan efektif, sehingga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ditentukan oleh dimensi *content of policy* dan *context of policy*. Oleh karena itu dibutuhkan dimensi *political will* dan kelembagaan dalam menterjemahkan implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J. A. (1975). *Public Policy Making: Basic Concept in Political Sciences*. New York: Praeger University Series.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hogwood, B. W., & Gunn, L. A. (1984). *Policy Analysis for the Real World*. London: Oxford University Press.
- Keban, J. T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Kementrian PUPR. (2017). Renstra Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peraturan Menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2016 tentang kemudahan dan/atau Bantuan perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana telah di ubah dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 21/PRT/M/2016;
- Satibi, I. (2011). *Teknik Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Bandung: Ceplas.
- Sumas, S. (2014). Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor Perencanaan Program dan Anggaran Bidang Ketenagakerjaan Tahun 2015 untuk wilayah barat, dalam rangka sinkronisasi (sinergitas) penyusunan program dan kegiatan antar pusat dan daerah tahun 2016.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Weimer, D. L., dan Vining, A. R. (1999). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Editor: Subarsono. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Woll, P. (1986). *Constitutional Democracy*. Boston-Toronto: Little Brown and Company.